

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu negara. Jika tingkat kemiskinan rendah, maka program pembangunan telah berhasil dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Menurut Yacoub, kemiskinan merupakan persoalan yang mendasar karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan dan merupakan masalah yang bersifat global. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin perkotaan dan perdesaan di Indonesia cenderung terus menurun sejak tahun 2006 dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini tentu saja merupakan suatu pertanda yang baik karena artinya perekonomian Indonesia mengalami peningkatan. Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antara penduduk miskin.

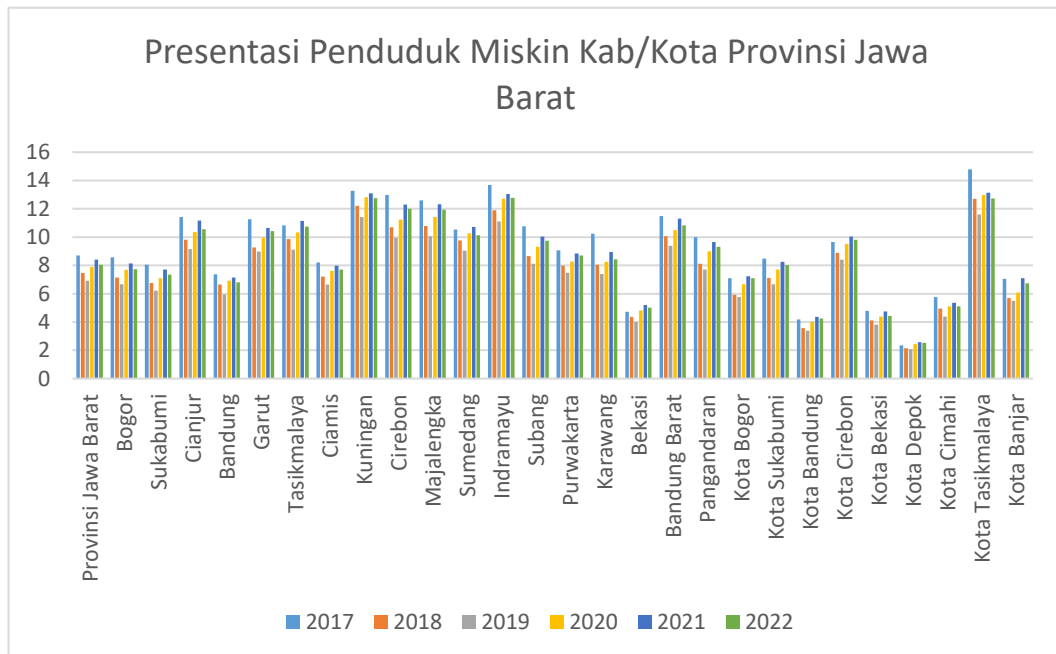
Kemiskinan memang bukan hanya persoalan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi. Tetapi, berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, serta ketidakmampuannya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta sebagai masalah yang berhubungan dengan pembangunan manusia. Dalam memahami permasalahan kemiskinan di Indonesia, perlu di perhatikan dari kegiatan sehari-hari yang ada di masing-masing daerah, yaitu dari kemiskinan pada

tingkat daerah yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Dengan begitu pemecahan masalah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih objektif dan tepat sarannya. Adapun faktor-faktor lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap pengentasan kemiskinan yaitu dari aspek demografi, dan aspek ekonomi. Aspek demografi dilihat dari variabel tingkat angkatan kerja (AK). Aspek pendidikan dilihat dari variabel rata-rata lama sekolah (RLS). Aspek ekonomi dilihat dari variabel Upah Minimum Regional (UMR). (Monang & Bangun, 2018).

Terjadinya Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang mencakup aspek kehidupan sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat yang menjadikan masalah kemiskinan menjadi isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2017-2022. Usaha pemerintah dan masyarakat untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan Indonesia semakin menurun. Secara umum, pada periode September 2012–Maret 2023 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Dibandingkan September 2022, jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis. Karena sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Kuncoro, 2019). Salah satu program prioritas Gubernur terpilih (2017-2022) Ridwan Kamil yaitu mengentaskan kemiskinan. Pembangunan ekonomi yang terpusat di Pulau Jawa, tidak lepas dari masalah kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik, masalah kemiskinan di Indonesia terletak pada pulau Jawa, terutama di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan selama ini pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa hanya dirasakan oleh golongan masyarakat tertentu dan tidak merata ke semua masyarakat. Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi ke-4 di pulau jawa tercatat 3,9 juta orang. Garis kemiskinan perkapita pertahun di 2019 sebesar Rp.43.309.190 terus meningkat hingga di 2022 mencapai Rp.49.038.410. Penyebabnya (Ketimpangan ekonomi) ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara ekonomi berbeda sangat mencolok, (Lapangan kerja dan kualitas pendidikan) yaitu kualitas yang tidak merata membatasi akses ke pekerjaan yang lebih baik, (Kebijakan pembangunan )yang tidak terfokus atau tidak merata juga menjadi faktor, pembangunan yang terkonsentrasi di daerah tertentu tanpa memperhatikan kebutuhan daerah lainnya bias memperparah ketimpangan dan kemiskinan.

Dibawah ini data persentase penduduk miskin di Jawa Barat pada tahun 2017-2022:



**Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin pada Tahun 2017-2022 (persen)**

*Sumber :BPS Indonesia Tahun 2017-2022*

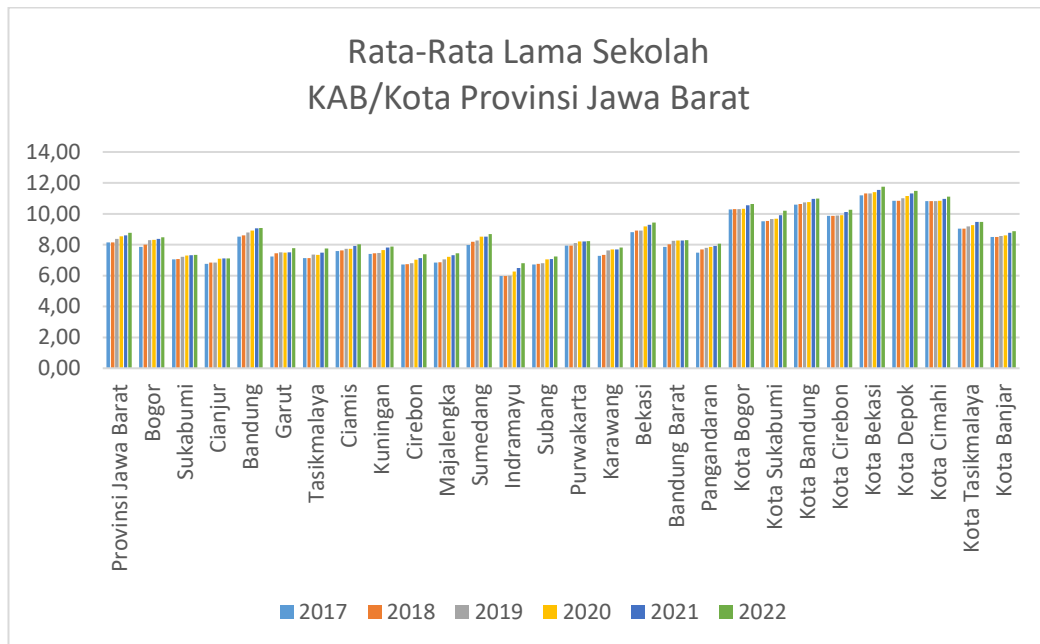
Pada Gambar 1.1 menunjukkan persentase penduduk miskin yang dimana pada tahun 2017 data penduduk miskin tertinggi sebesar 14,80%, di tahun 2018 12,71%, dan di tahun 2019 12,97%. Data tertinggi diatas persentase penduduk miskin yang dimana di 3 tahun tersebut berada di Kota Tasikmalaya. Kemudian data terendah kemiskinan terdapat di Kota Depok pada tahun 2017 yaitu 2,34%, di tahun 2018 2,14%, dan di tahun 2019 2,075.

Tasikmalaya menjadi salah satu kabupaten yang menghadapi tantangan dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Masalah utama yang menyebabkan Kota Tasikmalaya menjadi kota termiskin karena tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya investasi dalam pengembangan ekonomi

lokal, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sedangkan Kota Depok menjadi kota terendah kemiskinan karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil, infrastruktur yang memadai, didorong oleh sektor jasa, perdagangan, dan pendidikan.

Kota Tasikmalaya menjadi daerah tertinggi kemiskinannya dibandingkan Indramayu yang menjadi daerah tertinggi kedua di Jawa Barat pada 2017. Tasikmalaya mencapai 14,80% sedangkan Indramayu 13,67%. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, dibutuhkan upaya yang komprehensif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ini bisa termasuk program-program untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah. Peningkatan kerja sama antar berbagai pihak juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran. Berikut data indeks pendidikan menurut Kota/Kab di Jawa Barat tahun 2017-2022:



**Gambar 1.2 Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2017-2022 (persen)**

*Sumber :BPS Indonesia Tahun 2017-2022*

Berdasarkan pada Gambar 1.2 menunjukkan indeks pendidikan tercatat dalam beberapa tahun terakhir. Paling rendah tingkat pendidikan yaitu di Indramayu sebesar 53,82% ditahun 2017, sebesar 53,88% ditahun 2018 di Indramayu, dan 53,97% di tahun 2019 di Indramayu. Sedangkan data Indeks Pendidikan paling tinggi di Jawa Barat yaitu pada tahun 2017 74,66% di Kota Cimahi dan Depok datanya sama, di tahun 2019 yaitu 75,19% di Kota Bekasi, di tahun 2019 yaitu 75,86% di Kota Bekasi. Bisa dikatakan data indeks pendidikan di Provinsi Jawa Barat cenderung berfluktuatif.

Di kabupaten Indramayu menjadi wilayah paling rendah tingkat pendidikannya, karena dilihat dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dirata-ratakan lama sekolahnya hanya 5,9 tahun. Artinya rerata lama sekolah di

Indramayu hanya sampai bangku sekolah dasar saja hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

RLS Menggambarkan jumlah tahun penduduk mengenyam pendidikan formal. Menurut teori human capital modal di bidang pendidikan akan menghasilkan lulusan yang memiliki produktifitas tinggi, Semakin tinggi maka semakin baik kualitasnya. pendidikan dapat membuat seseorang keluar dari lingkaran kemiskinan.

Definisi secara umum yang sering dipergunakan dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah definisi kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan dalam mencapai standar kehidupan yang minimum Bank Dalam laporannya di hadapan anggota PBB yang bertema "Poverty and Human Development" mengatakan bahwa, pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan

aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya, Menurut Nasution, Z. dan Hartono (2017) terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan, yakni (1) Rendahnya pendidikan, (2) Malas bekerja, (3) Keterbatasan sumber alam, (4) Keterbatasan lapangan kerja, (5) Keterbatasan modal dan, (6) beban keluarga. Menurut BPS (2018) berpebdapat bahwa terdapat 3 indikator kemiskinan yang dilihat dari pendekatan kebutuhan dasar yaitu: presentase, unakan indikator persentase nasional Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh faktor Kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa 94,2% kemiskinan dipengaruhi oleh berberapa faktor diatas. Adapun sektor yang berperan dalam pengentasan kemiskinan di tahun 2018 menurut informasi yang dimuat dalam berita tempo.co, tribunjateg menyebutkan bahwa yaitu (1) UMKM, (2) program subsidi, ((3) peningkatan UMK. Peneliti menggunakan indikator persentase penduduk miskin (HCI-P0) didalam penelitiannya, Headcount Index secara bertujuan mengukur presentase penduduk miskin, yang data berasal dari hasil survey nasional (SUSENAS) tahunan, Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung akan berdampak pada penurunan kemiskinan. Teori ekonomi neo klasik menyatakan bahwa berpendapat bahwa PDRB adalah tolak ukur pertumbuhan ekonomi di daerah. Menurut badan pusat statistik laju pertumbuhan ekonomi adalah meningkatnya produk domestik bruto harga konstan (riil) secara keseluruhan sektor ekonomi dari



tahun ke tahun, sama halnya dengan laju penduduk miskin (HCI-P0) didalam penelitiannya, Headcount Index secara bertujuan mengukur presentase penduduk miskin, yang data berasal dari hasil survey (SUSENAS) tahunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi & Rejeningsih (2020) bahwa kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh faktor Kesehatan, pendidikan, pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa 94,2% kemiskinan dipengaruhi oleh berberapa faktor diatas. Adapun sektor yang berperan dalam pengentasan kemiskinan di tahun 2018 menurut informasi yang dimuat dalam berita tempo.co, tribunjateg menyebutkan bahwa yaitu (1) UMKM, (2) program subsidi, ((3) peningkatan UMK.

Kebanyakan masyarakat kita menganggap bahwa ukuran keberhasilan hidup seseorang dari kemampuan ekonomi seseorang tersebut, memang tidak seluruhnya salah tetapi ada hal yang harus diluruskan (Mulyadi, 2018). Pemahaman seperti itulah yang mengakibatkan banyaknya orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya karena menurut pemahaman mereka, anak-anak tidak sekolahpun bisa mencari uang misalnya bekerja di ladang atau sebagai nelayan. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen sentral dalam pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan suatu negara untuk memajukan pendidikan akan membawa perubahan tidak hanya pada sektor ekonomi semata namun juga sektor politik, sosial, dan budaya.

Penyebab pengangguran dan kemiskinan utamanya karena ketidak seimbangan antara pekerja dan pertumbuhan angkatan kerja, menyebabkan

persaingan ketat dan meningkatkan kemiskinan. Berikut data angkatan kerja di Jawa Barat tahun 2017-2022 :



**Gambar 1.3 Angkatan Kerja pada Tahun 2017-2022 (jiwa)**

*Sumber :BPS Indonesia Tahun 2017-2022*

Berdasarkan pada Gambar 1.3 dapat diamati terdapat data angkatan kerja yang terendah pada tahun 2017-2019. Dapat dilihat pada tahun 2017 sebesar 142.285 jiwa di Kota Sukabumi, pada tahun 2018 sebesar 145.158, kemudian pada tahun 2019 yaitu 153.805 jiwa. Sedangkan data tingkat angkatan kerja paling tertinggi pada 2017 yaitu 1.649.064 jiwa di Kabupaten Bandung, pada 2018 yaitu 1.658.601 jiwa, dan di 2019 yaitu 1.786.162 jiwa. Bisa dikatakan data angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat cenderung berfluktuatif.

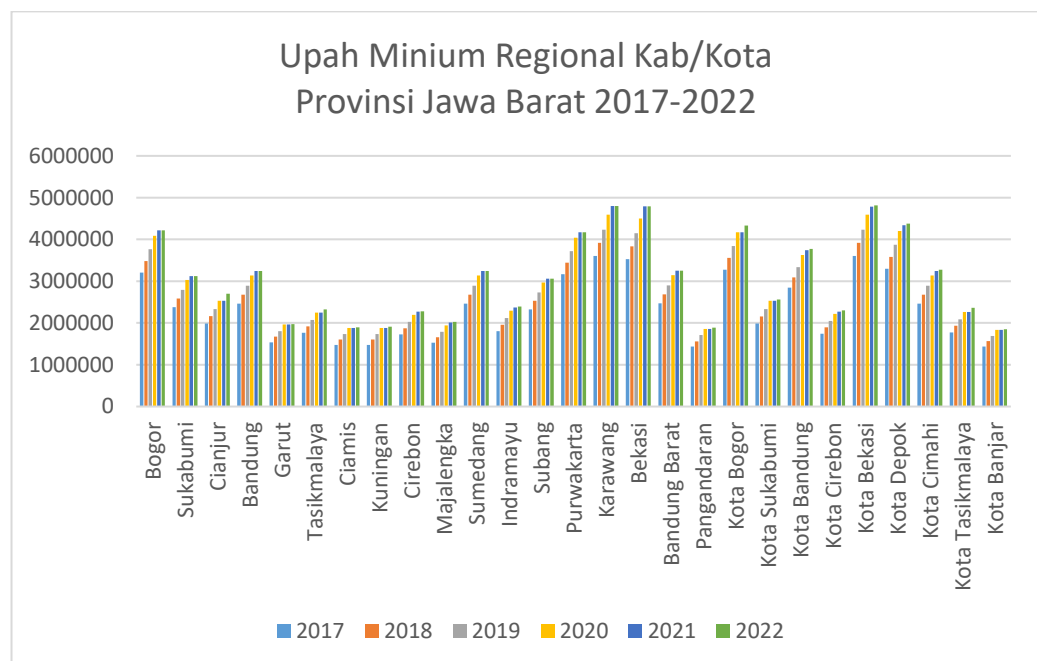
Di Kota Sukabumi menjadi kota paling rendah angkatan kerja karena Produktivitas pada tenaga kerja yaitu pertumbuhan ketenagakerjaan tidak disertai dengan peningkatan produktivitas pada tenaga kerja. Kondisi tersebut menyebabkan upah pekerja tidak meningkat, sementara disisi lain semua kebutuha

semakin naik. Menurut Sumarsono (2020) angkatan kerja (labor force) adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan.

Arsyad (2019). masalah sempitnya kesempatan kerja merupakan salah satu akar permasalahan kemiskinan Malthus dalam Sudirman & Sakinah (2020) Produktivitas mengikutsertakan pendaya gunaan secara terpadu sumber daya manusia dan keterampilan, barang modal, teknologi manajemen, informasi, energi dan sumber-sumber lain kepada pengembangan dan peningkatan standar untuk seluruh masyarakat melalui konsep produktivitas persemester. Sumarsono (2019) Menurut pendapat dari Sumarsono, angkatan kerja ialah bagian penduduk yang sanggup dan bersiap untuk menjalankan suatu pekerjaan.. Arsyad (2021). Penyerapan angkatan kerja yang tinggi belum tentu berdampak pada pengurangan kemiskinan. Selama empat dekade terakhir beberapa negara sedang berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat namun tidak berhasil mengurangi angka kemiskinan yang begitu memprihatinkan. Sukirno (2018). terdapat pengaruh langsung antara pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibenstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di Negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. (Sudirman

& Sakinah, 2020). Berdasarkan hasil penelitian oleh Isnaini sofia dan Ris Nugroho (2021) yang dinyatakan bahwa angkatan kerja/tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini ini berarti semakin banyak Angkatan kerja namun tidak bekerja akan semakin menambah jumlah Masyarakat miskin.

Pendapatan pekerjaan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi dengan tidak adanya pendaatan kemskinan akan semakin tinggi. Berikut data Daftar Upah Minimum di Jawa Barat tahun 2017-2022 :



**Gambar 1.4 Daftar Upah Minimum Kab/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2017-2022 (rupiah)**

*Sumber :BPS Indonesia Tahun 2017-2022*

Berdasarkan pada Gambar 1.4 dapat diamati terdapat data daftar upah minimum yang terendah pada tahun 2017-2019. Dapat dilihat pada tahun 2017

sebesar Rp.1.433.901 di Kabupaten Pangandaran, dan pada tahun 2018 yaitu Rp.1.558.793, kemudian pada tahun 2019 yaitu Rp.1.733.162. Kemudian data daftar upah minimum yang tertinggi pada tahun 2017-2019 yaitu, di tahun 2017 Rp.3.605.272 di Kabupaten Karawang, di tahun 2018 Rp.3.919.291, di tahun 2019 yaitu Rp.4.234.010. Bisa dikatakan data angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat cenderung berfluktuatif.

Di Kabupaten Pangandaran menjadi wilayah paling rendah upah minimumnya karena dilatar belakangi pendapatan yang belum maksimal, karena mayoritas perusahaan di Pangandaran adalah perhotelan dan restoran. Sedangkan di Kabupaten Karawang menjadi wilayah paling tinggi upah minimumnya karena adanya inflasi yang lebih tinggi dan di Kabupaten karawang banyak sektor industri yang menjadi banyaknya lapangan pekerjaan.

Menurut Marinda et al., (2018), Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Menurut Panjaitan (2020) Tingkat upah memegang peranan penting atau sangat berpengaruh besar dalam kondisi ketenagakerjaan, dimana tingkat upah yang kecil dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penganggur karena nilai upah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya.

Semakin baik kondisi perekonomian maka semakin tinggi upah yang diterima. Menurut (Mustika, 2017)) semakin banyak output yang dikeluarkan perusahaan maka berpengaruh kepada upah yang diterima. Maka perusahaan

sebagai akibat banyaknya output berimbas kepada pengurangan tenaga kerja. Menurut Manning & Junankar (2018) pada awal masa pembangunan sering disampaikan bahwa masyarakat miskin tidak dapat beradaptasi sehingga menyebabkan pengangguran. Jika kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkat dan terbebas dari masalah kemiskinan. Selain itu kegagalan dalam mengatur sistem pembagian upah padahal upah sendiri sumber penghasilan tetap demi kesejahteraan, namun jika upah turun maka kesejahteraan juga ikut turun yang pasti mempengaruhi tingkat kemiskinan (Kesmala, 2022). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sabyan Muhammad & Widyanti Rina, 2022) menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh hal ini karena dengan adanya standar upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan dapat memberikan penghasilan yang layak bagi para pekerja/karyawan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan produktivitas pekerja dapat meningkat. Hal tersebut juga merupakan perlindungan bagi para pekerja agar tidak terjerat dalam kemiskinan

Berdasarkan fenomena uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat sehingga diharapkan bisa digunakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja dan UMR Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2022 ”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendidikan, angkatan kerja, dan UMR secara parsial terhadap Tingkat kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022 ?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat pendidikan, angkatan kerja, dan UMR secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2017-2022 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja, dan UMR secara Parsial terhadap Tingkat Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022
2. Untuk Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan, Angkatan Kerja, dan UMR secara bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022

## **1.4 Manfaat Penelitian (Kegunaan Penelitian)**

Adapun manfaat dari penelitian berjudul “Pengaruh Pendidikan, Angkatan Kerja dan UMR Terhadap Indeks Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2017-2021” adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan penelitian ini dilakukan untuk penyusunan skripsi dalam rangka penyelesaian tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Siliwangi.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam upaya mengurangi keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait keparahan kemiskinan.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang factor-faktor yang mempengaruhi keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat.

### **1.5 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan guna memperoleh data untuk menunjang skripsi ini yaitu berupa publikasi dari laporan tahunan Badan Pusat Statistik Jawa Barat.



